

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(STUDI KASUS DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Starta I Pada
Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh:

AZHARI SETYAWAN

NIM : C.100.130.004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank
(Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir
Kabupaten Sragen)

PUBLIKASI ILMIAH

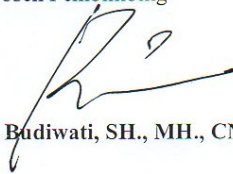
Yang ditulis oleh :

AZHARI SETYAWAN

C.100.130.004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, SH., MH., CN.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 14 Agustus 2017

Dewan Penguji,

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti artikel publikasi ini hasil plagiat, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 14 Agustus 2017

Yang menyatakan



Azhari Setyawan

NIM : C.100.130.004

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus di Perusahaan Daerah BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen)**

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu pusat perekonomian yang bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia karena menyangkut kemakmuran hidup. Pada umumnya mereka memanfaatkan bentuk layanan dari bank yaitu kredit untuk menunjang usaha agar lebih baik sehingga dapat meningkatkan taraf kemakmuran hidup masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank dan untuk mengetahui klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian kredit bank. Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu melakukan studi kepustakaan. Bahwa pada dasarnya pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank harus dilaksanakan secara menyeluruh, dengan cara mengupayakan adanya keseimbangan diantara para pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hal tersebut dilaksanakan guna tercapainya pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.

Kata Kunci : Perbankan, Asas Kebebasan Berkontrak, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit Bank

ABSTRACT

Banking is one of the economic centers that have intersects with human life because it concerns the prosperity of life. They take the advantage of the service form of the bank is credit to support the business to be better so as to improve the level of prosperity of life of the community. The formulation of this research is to know the implementation of the principle of freedom contract on the agreement of credit in Bank and to know the clause of exoneration that is applied on the agreement of credit Bank. The approach is using empirical juridical. The type of the research is descriptive qualitative. The methods of data collection are interview, observation, and documentation. The method of analyzing data is doing literature study. Based on the implementation of the freedom of contract on the agreement of credit in Bank has to be implemented thoroughly by way of working on the balance between the two parties that is Bank as creditor and customer as debtor. It implemented in order to achieve the implementation of the principle of freedom of contract on the agreement of credit Bank.

Keywords: banking, the principle of freedom credit, the clause of exoneration, the agreement of credit bank.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia ekonomi memiliki peranan yang signifikan terhadap perkembangan manusia, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bidang ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas, dimana setiap hal pasti bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia yang fundamental. Salah satu lembaga keuangan yang dalam dunia ekonomi yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu lembaga perbankan. Sehingga lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang dalam hal ini mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan serta memerlukan dana. Bentuk layanan dari bank yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kredit.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada, dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh serta membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup orang banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana sesuai dengan pengertian Bank dalam Pasal 1 butir 2 berbunyi

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Jika dicermati dari dua fungsi utama bank terdapat hubungan yang erat antara bank dengan nasabahnya. Apabila bank berfungsi sebagai penyalur dana maka disini bank bertindak sebagai kreditur, sedangkan nasabah berperan sebagai debitur. Hubungan antara bank dengan nasabah debitur tersebut terikat dalam suatu perjanjian kredit bank.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Karena suatu perjanjian dimulai dengan adanya “kesepakatan”. Dan tidaklah mungkin salah satu pihak sepakat untuk dirugikan oleh pihak lainnya. Namun fenomena yang terjadi dalam perjanjian kredit bank menunjukkan hal yang sebaliknya. Setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian, yang isi dari perjanjian terlebih dahulu telah dibakukan. Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat kepada calon nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat dalam formulir tersebut setuju atau tidak.²

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian, yaitu *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. *Kedua*, Bagaimanakah klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

² Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, hal.32.

2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian, yaitu *Pertama*, Untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. *Kedua*, Untuk mengetahui klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif , dimana penelitian ini membuka peluang untuk pendekatan analisis yuridis bagi tergalinya keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian antara bank dengan nasabah debiturnya.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan Metode Wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan secara lisa guna mencapai tujuan tertentu, kemudian Metode Observasi yaitu untuk mengamati langsung kegiatan orang-orang yang menjadi sasaran dalam penelitian ini pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dan Dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mencatat hal-hal yang terdapat dalam perjanjian baku antara nasabah debitur dengan pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen serta formulir-formulir yang tersedia dalam pelaksanaan perjanjian baku.

Metode analisis yang gunakan dalam penelitian adalah *Pertama*, berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. *Kedua*, melakukan penelurusan lapangan dengan melakukan wawancara tak terstruktur dengan responden yaitu Pejabat PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen serta masyarakat sebagai nasabah atau calon nasabah debitur. *Ketiga*, setelah data terkumpul baik dari penelurusan kepustakaan maupun penelurusan lapangan, maka dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, yaitu adanya keseimbangan diantara para pihak dalam arti keseimbangan posisi antara PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur.³

Dapat dilihat mengenai Mekanisme sebelum Nasabah datang ke Kantor untuk menanda tangani perjanjian kredit, yaitu adanya suatu mekanisme dimana menyangkut perundingan mengenai bagaimana nantinya kredit yang akan diambil, kemudian angsuran per bulan, provisi, denda beserta bunga nya. Adapun proses awal sebelum penanda tanganan kredit diantaranya sebagai berikut :⁴

- 3.1.1 Calon nasabah datang ke kantor PD. BPR Djoko Tingkir perihal akan mengajukan kredit, kemudian pihak PD. BPR Djoko Tingkir akan menanyai mengenai tujuannya dalam meminjam kredit dan jenis kredit apa yang akan diambil di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.
- 3.1.2 Kemudian pihak PD. BPR Djoko Tingkir keesokan harinya mengirimkan Account Officer (AO) ke rumah atau tempat bekerjanya nasabah. Disitu Account Officer dan pihak nasabah melakukan perundingan mengenai bagaimana nantinya kredit yang akan diambil, kemudian angsuran per bulan, provisi beserta bunga nya. Disitu sekaligus diberikan penjelasan mengenai denda apabila calon nasabah atau debitur melakukan wanprestasi dikemudian hari.

³ Wawancara dengan Ibu Siti Roikhanah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 08.30 WIB

⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Roikhanah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 08.37 WIB

Pada saat dilapangan ada salah satu nasabah atau debitur yang dalam hal ini pekerjaan beliau sebagai seorang Pedagang di Pasar, beliau mengambil pinjaman “KREDIT JODANG” untuk usaha dagang. Lalu penulis bertanya apakah pada saat perundingan antara nasabah sebagai debitur dengan pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagai kreditur, apakah saudara debitur diberikan kebebasan dalam hal menentukan bentuk dan isi dari perjanjian kredit tersebut. Beliau menjelaskan Ya memang betul, sebelum nasabah datang ke kantor untuk menanda tangani perjanjian ada pihak bank yang datang ke tempat kami. Pihak bank tersebut dinamakan Account Officer (AO). Nasabah juga bercerita bahwa Pihak Bank yang datang ke tempat usaha mereka menanyakan usaha di bidang apa, kemudian berapa kredit yang akan diambil. Setelah itu pihak bank melakukan penghitungan mengenai besaran kredit per bulan beserta Bunga dan provisi nya serta barang jaminan apa yang akan diserahkan. Setelah dihitung pihak bank menyerahkan penghitungannya tersebut ke pihak nasabah dalam hal ini apakah nasabah setuju atau tidak. Apabila nasabah setuju langsung diteruskan ke pihak bagian kredit apabila tidak setuju dilakukan penghitungan ulang sampai terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵

Pihak bank PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam proses awal sudah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyangkut mengenai kesepakatan dari para pihak dalam suatu perjanjian dan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan yaitu dapat dilihat pada saat tim PD. BPR Djoko Tingkir datang ke tempat nasabah untuk melakukan perundingan hingga tercapai kesepakatan dengan nasabah mengenai kredit yang akan diambil serta melaksanakan asas kebebasan berkontrak mengenai apa yang disebut dengan kesepakatan dari para pihak.

⁵ Wawancara dengan nasabah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 09.30 WIB

Tahap selanjutnya setelah proses awal selesai yaitu Account Officer (AO) dari PD. BPR Djoko Tingkir yang telah mendatangi calon debitur kembali ke kantor untuk melaporkan hasil kesepakatan dengan calon debitur kepada Administrasi Kredit di kantor untuk dicek dan dimintakan persetujuan oleh Kepala Bagian Kredit. Apabila nominal kurang dari 50 Juta maka cukup dimintakan persetujuan kepada Kepala Bagian Kredit saja, sedangkan diatas 50 juta maka setelah Kepala Bagian Kredit memberikan persetujuan lalu dimintakan persetujuan ke Komite Kredit. Setelah itu juga dimintakan persetujuan ke Direksi. Setelah disetujui, maka pihak bank memberitahukan ke calon nasabah atau debitur untuk keesokan harinya datang ke kantor beserta membawa perlengkapan syarat yang diperlukan. Hal ini mengacu pada aturan yaitu Surat Direksi PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang telah mereka buat.⁶

Selanjutnya pada proses akhir yaitu calon nasabah datang ke kantor PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, dilakukan pengecekan berkas persyaratan oleh Legal Office (LO), apabila Legal Office (LO) telah menyatakan lengkap maka calon nasabah atau debitur diberikan surat perjanjian kredit untuk ditanda tangani. disini pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen memberikan kesempatan kepada calon nasabah atau debitur untuk membaca dan memahami isi dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit tersebut. Apabila pihak calon nasabah telah setuju maka dilakukan penandatanganan oleh calon nasabah tersebut.⁷

Kemudian salah satu nasabah menjelaskan Ya memang betul sebelum nasabah menandatangani surat perjanjian kredit tersebut, pihak PD. BPR Djoko Tingkir memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Roikhanah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 08.45 WIB

⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Roikhanah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 08.50 WIB

tersebut. Setelah nasabah membaca dan memahami apabila sudah sesuai dengan perundingan kemarin maka dilakukanlah penandatanganan, lalu uang pinjaman dapat dicairkan dihari lain. proses akhir sudah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu dapat dilihat ketika pada saat pihak PD. BPR Djoko Tingkir memberikan kesempatan kepada calon nasabah atau debitur untuk membaca dan memahami isi dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit tersebut.

3.2 Klausula Eksonerasi yang diterapkan dalam Perjanjian Kredit Bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen

Dalam perjanjian baku biasanya terdapat klausul-klausul yang dapat dikatakan memberatkan nasabah debitur. Hal ini terjadi karena perjanjian baku atau *standard contract* merupakan perjanjian sepihak yang memuat klausul-klausul yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh produsen tanpa melibatkan konsumen, sehingga merupakan sesuatu yang logis apabila dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausul-klausul yang tidak sesuai dengan kehendak konsumen bahkan sangat merugikan konsumen. Hal ini disebut juga dengan klausula eksonerasi.

Pengertian klausula eksonerasi menurut Shidarta adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).⁸

Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit antara Pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku kreditur dengan calon nasabah selaku debitur didalam perjanjian tersebut menurut beliau tidak ada klausul-klausul yang memberatkan kreditur atau calon nasabah. Karena, pengisian bagian yang kosong dalam klausul-klausul seperti pasal 4 ayat (1)

⁸ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 120

tersebut sebelumnya telah dilakukan perundingan terlebih dahulu antara pihak bank selaku kreditur dengan calon nasabah selaku debitur. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai pengisian bagian yang kosong dalam klausul tersebut mengenai biaya provisi dikenakan sebesar 1% dari plafond kredit dan biaya administrasi dikenakan sebesar 1,5% dari plafond kredit, sama halnya dengan pasal 9 mengenai apabila nasabah lalai membayar atau wanprestasi berkewajiban membayar denda (*penaltryate*) terhadap kreditur sebesar tunggakan pokok dikalikan suku bunga perbulan, hal itu diberikan sesuai dengan surat keputusan direksi yang dibuat oleh pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.⁹

Wawancara dengan nasabah yang pekerjaan beliau sebagai seorang Pedagang di Pasar, beliau mengambil pinjaman “KREDIT JODANG” untuk usaha dagang. Kemudian penulis mencoba bertanya mengenai apakah klausul-klausul dalam perjanjian kredit ada yang dirasa memberatkan nasabah dalam menjalankan perjanjian kredit tersebut. Kemudian beliau menjawab tidak ada, karena sebelum ditanda tangani pihak debitur diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit termasuk nominal pembayaran kredit per bulan, bunga perbulan, biaya provisi, biaya administrasi dan denda apabila lalai membayar sudah diberitahukan di awal pada saat perundingan. Dengan membaca dan memahami hal tersebut bermaksud apabila ada bagian-bagian yang memberatkan pihak nasabah selaku debitur maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi menurut nasabah dalam perjanjian kredit tersebut klausul-klausul yang ada didalamnya tidak ada yang memberatkan nasabah selaku debitur.¹⁰

Sehingga dalam Pasal 4 perjanjian kredit disebutkan :

⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Roikhanah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 08.50 WIB

¹⁰ Wawancara dengan nasabah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, 7 Juli 2017 pukul 09.30 WIB

Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR dikenakan bunga sebesar tahun Flate Rate (bunga perbulan X plafond pinjaman) , yang selanjutnya harus dibayar oleh DEBITUR kepada bank setiap tanggal Setiap bulan sejumlah Yang terdiri dari angsuran pokok

Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR dikenakan provisi sebesar Dan administrasi sebesar Dari plafond kredit.

Sedangkan dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit disebutkan :

“Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, DEBITUR menunggak dalam kewajiban angsuran pokok dan bunga dan atau tidak melunasi kredit, maka DEBITUR diwajibkan untuk membayar biaya tambahan (denda) atas sejumlah tunggakan pokok dikalikan suku bunga per bulan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 untuk setiap bulannya.”

Demikian halnya dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen pada klausul Pasal 4 ayat (1) dan (2) tersebut bagian-bagian yang kosong pada klausul tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang keharusan melakukan itikad baik dalam suatu perjanjian. Sehingga dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 tersebut tidak termasuk kedalam klausul yang disebut klausul eksonerasi atau memberatkan konsumen karena klausul tersebut sebelumnya sudah dilakukan perundingan terlebih dahulu antara pihak PD. BPR Djoko Tingkir selaku kreditur dengan Nasabah selaku debitur untuk Pasal 4 ayat (1) sedangkan untuk Pasal 4 ayat (2) pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dalam memberikan biaya provisi dan biaya administrasi, dan Pasal 9 mengenai denda sesuai dengan aturan yaitu surat keputusan direksi. Untuk pasal 9

bermaksud sebagai upaya menanggulangi debitur melakukan wanprestasi. Maka hal ini mereka membuat klausul-klausul dalam surat perjanjian kredit tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi yang dibuat oleh pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, karena tidak ada yang mengandung klausula eksonerasi atau klausul yang memberatkan debitur atau nasabah, sehingga PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada dan beserta visi misi yang mereka gunakan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sudah melaksanakan secara menyeluruh, dengan mengupayakan adanya keseimbangan diantara para pihak dalam arti keseimbangan posisi antara PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hal ini terlihat dari mekanisme awal yaitu menyangkut perundingan mengenai bagaimana nanti kredit yang akan diambil, kemudian angsuran per bulan, provisi, denda beserta bunga nya, maka dari itu PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku kreditur selalu melibatkan nasabah selaku debitur dalam penentuan angka-angka nominal yang masih kosong kemudian nantinya akan di masukkan dalam pembuatan surat perjanjian kredit. Selanjutnya pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen pada mekanisme akhir sebelum penanda tangan perjanjian kredit yaitu pihak nasabah selaku debitur diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit tersebut, dengan maksud supaya tidak ada kesalahan dalam pencantuman klausul yang telah disepakati sebelumnya lalu setelah semua setuju dilakukanlah penanda tangan perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Sehingga pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sudah menerapkan mekanisme untuk

membaca dan memahami terlebih dahulu klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit sebelum nasabah selaku debitur menandatangani debitur. Dimana kedua hal tersebut harus diterapkan guna tercapainya pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.

Kedua, Klausula Eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen terhadap nasabah sudah cukup baik, karena sesuai dengan aturan dasar mengenai klausula eksonerasi. Seperti halnya pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata jika dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 perjanjian kredit bank, isi dari klausul pasal-pasal tersebut telah mencerminkan adanya itikad baik dari pihak bank dalam melaksanakan perjanjian kredit, karena klausul tersebut sebelumnya sudah dilakukan perundingan terlebih dahulu antara pihak bank dengan Nasabah. Sehingga klausul-klausul yang terdapat dalam surat perjanjian kredit yang dibuat oleh PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tidak ada yang mengandung klausula eksonerasi yang memberatkan debitur atau nasabah, namun memberikan kemudahan bagi debitur atau nasabah yang ingin membuka usaha namun tidak atau belum memiliki modal.

4.2 Saran

Pertama, Kepada pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen selaku lembaga keuangan (bank) khususnya dalam hal kredit bank agar tetap mempertahankan serta lebih ditingkatkan mengenai pelayanan yang lebih mudah untuk nasabah selaku debitur yang ingin mengajukan kredit bank untuk kelancaran usaha maupun kegiatan yang lainnya dengan membuka cabang-cabang, karena dengan adanya cabang-cabang tersebut akan lebih mendekatkan pelayanan kepada para calon nasabah dan kemudahan kredit bank yang diberikan oleh pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dapat melancarkan perputaran ekonomi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan visi dan misinya.

Kedua, Kepada Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isi, dan berlakunya perjanjian-perjanjian baku pada umumnya dan perjanjian-perjanjian baku yang khusus dipakai oleh kalangan tertentu, seperti perjanjian kredit bank yang digunakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan menjadi Undang-Undang, yang berlaku baik bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada : orang tua, saudara yang selalu memberikan doa, bimbingan, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah habis, serta teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mgs. Edy Putra The'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo

Subekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan